



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KRIAN 2021-2026



JL. GUBERNUR SOENANDAR PRIYO SUDARMO NO.1 DESA KRATON,
KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR 61262



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi karunia-Nya hingga terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Krian Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Kecamatan Krian ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krian pada hakekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Kecamatan Krian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam setiap program dan kegiatan pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan Krian sehingga dapat mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang



tertuang dalam dokumen perencanaan lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Krian, Maret 2023

Camat Krian



AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP.

Pembina Tk. I

NIP. 198003221998101001



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	16
2.2 Sumber Daya Kecamatan Krian.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krian	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan PD	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Krian	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Krian	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88



BAB VIII PENUTUP	93
-------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1_Kondisi Kepegawaian Kecamatan Krian_Berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.2_Kondisi Kepegawaian Kecamatan Krian_Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Formal	25
Tabel 2.3_Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Krian	26
Tabel 2.4_Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Krian_Tahun 2016-2021	29
Tabel 2.5_Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krian_Kabupaten Sidoarjo	31
Tabel 2.6_Tabel Peluang dan Tantangan	32
Tabel 3.1_Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan_Kecamatan Krian.....	33
Tabel 3.2_Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo.....	36
Tabel 3.3_Analisis Hasil Telaah Visi-Misi Dan Program Bupati dan Wakil_Bupati Sidoarjo	41
Tabel 3.4_Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Krian.....	49
Tabel 3.5_Perumusan Strategi dan Kebijakan.....	51
Tabel 4.1_Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Krian.....	54
Tabel 5.1_Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 6.1_Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Krian_Kabupaten Sidoarjo	59
Tabel 7.1_Indikator Kinerja Kecamatan Krian Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89
Tabel 7.2_Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Krian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	91



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Krian	17
---	----



BAB I PENDAHULUAN

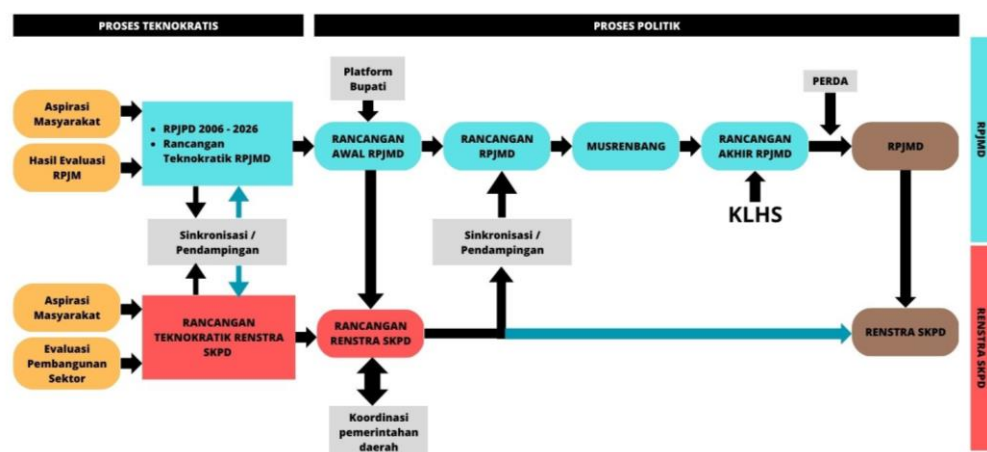
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Krian disusun sebagai langkah antisipatif dalam rangka merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, sehingga keberhasilan yang telah tercapai dapat terukur secara jelas sebagai bagian dari komitmen yang berorientasi pada masa depan yang ingin dicapai organisasi. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) yang menerima pelimpahan kewenangan dari bupati dalam melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintahan umum pembangunan dan ketertiban wilayah, harus mampu beradaptasi dan memiliki fleksibilitas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara prima. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibangun berangkat dari adanya komunikasi yang sehat antara penyelenggara pemerintahan terhadap konstituen masyarakatnya, dengan demikian pemerintahan diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan memiliki produktifitas yang tinggi. Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Krian Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.

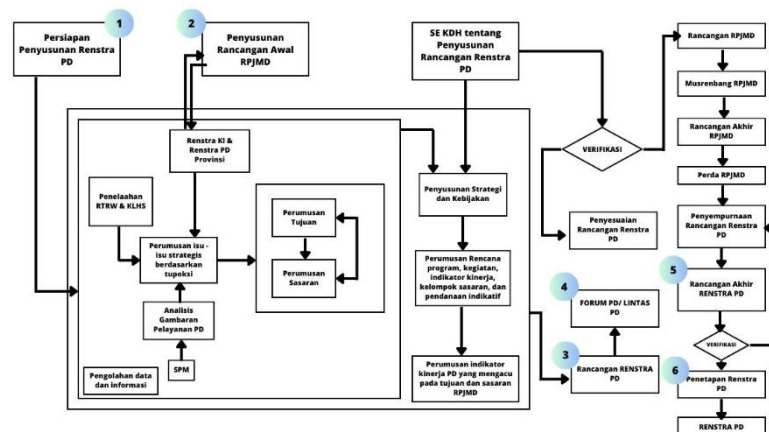


Gambar 1.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan awal Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Krian. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Kecamatan Krian untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Kecamatan Krian menjadi Renstra Kecamatan Krian. Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Camat harus sinkron dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini,



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Sidoarjo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sangat penting bagi Kecamatan Krian dan Masyarakat, Maka penyusunan Renstra Kecamatan Krian dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan



yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh PD yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dengan dokumen manajemen berbasis kinerja. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat daerah kecamatan Krian Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah kecamatan Krian dalam setiap tahun anggaran selama 5 tahun kedepan.

Hal yang terpenting dari latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Krian ini adalah keinginan yang kuat dari Kecamatan Krian untuk mewujudkan keseimbangan antara pemerintah dan aparatur, partisipasi dan transparansi sebagai pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Krian tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancanagan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26



- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas PP 18 tahun Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur



- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 62);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 64);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 77);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 80);
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 22).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Krian Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan Krian dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Krian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Krian dan menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Krian dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2026.
4. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
5. Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;
6. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Krian setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Krian terdiri dari 8 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah



dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD provinsi/kabupaten/kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;
 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/Kota.
 4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah; Dan



5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD sebagaimana.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang penutup Renstra PD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

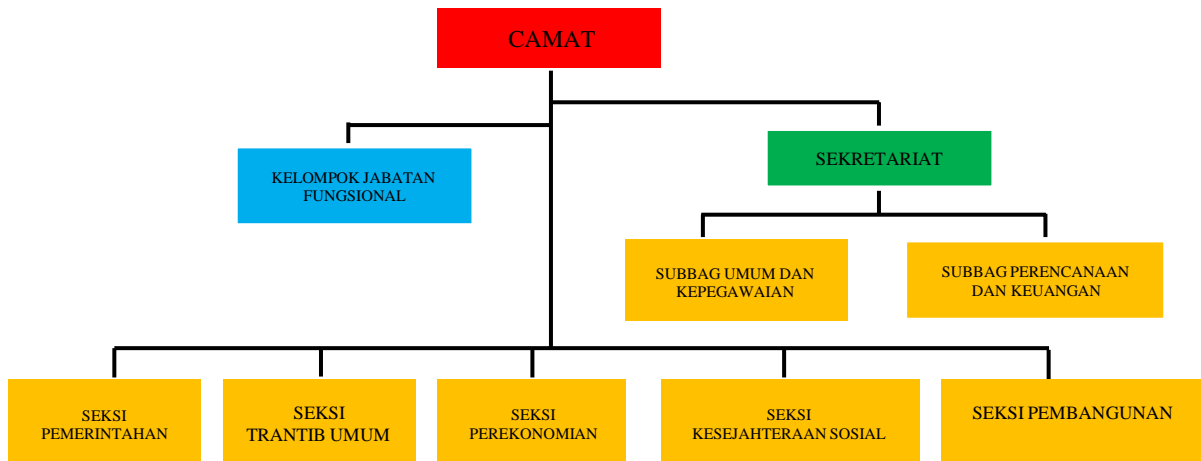
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Krian terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Camat
Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan
 - Seksi Ketertamanan dan Ketertiban
 - Seksi Pembangunan
 - Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Perekonomian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Krian



1. Camat

Camat mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;



- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat berwenang menandatangani/menfasilitasi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Mencetak Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal / desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO)Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;



- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 - 3. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
 - 4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
 - 5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
 - 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat



dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/reklame liar);
 4. Penanganan konflik sosial;
 5. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
 6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 7. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perekonomian. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian adalah Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;

- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;



2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 1. Pembinaan penanganan sampah domestik;
 2. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 M² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub-Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :



- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Krian

2.2.1 Kondisi Pegawai kecamatan Krian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Krian didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya perangkat daerah kecamatan Krian aparatur, sarana prasarana, serta



pengelolaan anggaran. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Krian sebanyak 74 orang terdiri Pejabat Struktural dan Staf serta kelompok jabatan Fungsional pada Dinas-dinas yaitu Penyuluh KB, sebagaimana diuraikan dalam kelompok kepangkatan/golongan sebagai berikut :

a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Kondisi pegawai di Kecamatan Krian berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin dapat dilihat melalui tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Krian
Berdasarkan Golongan

No	Uraian	IV		III		II		I		Kontrak		Honorer		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
		1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	-	1	1	2	4	3	-	-	-	-	7	1	19
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Seksi Pembangunan	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	5
5	Seksi Kesos	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Seksi Trantibum	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11	-	14
7	Seksi Perekonomian	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3
8	Dinas Sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyuluh KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelurahan Krian													
10	Lurah			1										
	Sekretariat			1										
	Staff					2				4				8
	Kelurahan Kemasan													
11	Lurah			1										
	Sekretariat			1										
	Staff					2				6				10
	Kelurahan Tambak													
12	Lurah			1										
	Sekretaris Kelurahan			1										
	Staff					1				6				9
Jumlah				14		20		0		16		22		74



Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Krian
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Formal

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki-Laki	51 orang
	- Perempuan	26 orang
2	Menurut Pendidikan Formal	
	- Starata 2	3 orang
	- Starata 1	16 orang
	- Sarjana Muda	4 orang
	- SLTA	49 orang
	- SLTP	2 orang
	- SD	-
3	Menurut Pendidikan Berjenjang	
	- Diklat Pim III	2 Orang
	- Diklat Pim IV	10 Orang
4	Menurut Kedudukan Jabatan	
	- Eselon IIIa	1 Orang
	- Eselon IIIb	1 Orang
	- Eselon Iva	6 Orang
	- Eselon Ivb	5 Orang
	- Staf	23 orang

Beberapa tabel yang telah diuraikan diatas merupakan kondisi kepegawaian yang menjadi sumber daya aparatur kecamatan Krian dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan serta Pelayanan kecamatan. Dengan adanya sumber daya aparatur yang berjumlah 74 orang tersebut sejatinya sudah dirasa cukup untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo hingga 5 tahun kedepan.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Krian

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Kantor Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih



memadai dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana prasarana yan dibutuhkan untuk menghasilkan suatu out put atau tingkat capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Krian karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Krian telah tersedia sarana dan prasarana yang telah tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Krian

No.	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3	Ruang Rapat	1	Baik
4	Panti PKK	1	Baik
5	Musholla	1	Baik
6	Gudang	1	Baik
7	Mobil Dinas Camat (Rush)	1	Baik
8	Mobil Dinas Sekcam (Terios)	1	Baik
9	Mobil Dinas Patroli	1	Baik
10	Mobil Dinas Panther	1	Baik
11	Sepeda Motor Dinas	13	Baik
12	Meja Kerja	25	Baik
13	Meja panjang Rapat Pendopo	3	Baik
14	Meja di ruang Rapat	1 set	Baik
15	Meja komputer	3	Baik



16	Kursi Kerja eselon	10	Baik
17	Kursi tamu /sofa	3 set	Baik
18	Kursi Rapat	100	Baik
19	Papan kegiatan	1	Baik
20	Kamar Mandi	8	Baik
21	Komputer	17	Baik
22	Printer	11	Baik
23	Televisi	7	Baik
24	Pesawat Telepon	1	Baik
25	Faximil	1	Baik
26	Jaringan Internet	6	Baik
27	CCTV	8	Baik
28	Brankas	1	Baik
29	Filling Kabinet	5	Baik
30	Lemari Kayu	10	Baik
31	Lemari besi	2	Baik

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Perangkat Daerah Kecamatan Krian terbilang belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Krian

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna untuk melihat perkembangan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Dengan mengetahui trend tersebut, akan mempermudah melakukan perencanaan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Krian meliputi :

1. Perekaman dan cetak KTP-Elektronik
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Identitas Anak (KIA)



4. Pindah Datang Antar Desa & Kecamatan
5. Pindah Keluar Antar Kecamatan
6. Kartu Pencari Kerja (AK1)
7. Rekomendasi Akta Perkawinan Non-Muslim
8. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
9. Rekomendasi Surat Keterangan Waris
10. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Izin Usaha Mikro Kecil
12. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
13. Legalisir Surat-Surat
14. Surat Induk Kesenian
15. Pengantar Surat Penelitian ke Desa
16. Surat Rekomendasi Permohonan Subsidi Listrik
17. Izin Keramaian yang telah disahkan oleh Camat
18. Surat Dispensasi Nikah



Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Krian
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	85,00	85,00	92,00	85	-	91,40	85,26	92,59	97,59	-	107,53	100,00	100,01	114,8
2	Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase hasil koordinasi bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan Juknis				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan Juknis				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa/kelurahan yang sudah melaksanakan musrenbang desa/kelurahan sesuai dengan Juknis				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Kecamatan Krian diperoleh dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belanja Daerah Kecamatan Krian adalah kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan Krian yang dibelanjakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Krian, baik itu pelayanan administrasi, kependudukan dan pelayanan lainnya. Perkembangan pendapatan dan Belanja Kecamatan Krian dilihat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sebagai berikut.



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18
PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	22.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	51.300.000,00	65.750.000,00	11.761.000,00	13.917.500,00	14.961.500,00	15.834.400,00	80.503.100,00	42.616.579,00	58,81%	61,86%	59,85%	63,34%	156,93%	64,82%	28.760.000,00	27.395.500,00
BELANJA DAERAH	7.100.155.677,76	8.564.551.254,20	8.591.335.349,00	12.668.024.436,00	13.898.777.460,00	11.650.388.442,00	6.474.994.032,00	6.411.236.219,00	7.705.911.967,00	11.323.832.586,00	11.432.523.336,61	11.282.459.301,00	91,20%	74,86%	89,69%	89,39%	82,26%	96,84%	10.164.568.835,39	8.669.699.628,12

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan Kecamatan Krian paling tinggi berada pada tahun 2020 yang mencapai angka 156,93% atau sejumlah 80.503.100,00 dari anggaran yang hanya berjumlah Rp. 51.300.000,00. Adapun pertumbuhan pendapatan paling rendah terdapat pada tahun 2016 yang hanya menyentuh angka 58,81% atau sejumlah Rp. 11.761.000,00 dari total anggaran yang berjumlah Rp.20.000.000,00. Sedangkan untuk realisasi belanja tertinggi terdapat pada tahun 2016 yang mencapai angka 91,20% atau sejumlah Rp.6.474.994.032,00 dari total anggaran belanja sejumlah Rp.7.100.155.677,76. Sementara itu, untuk realisasi belanja paling rendah terdapat pada tahun 2017 yang hanya mencapai angka 74,86% atau Rp.6.411.236.219,00 dari total anggaran yang berjumlah Rp.8.564.551.254,20.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan PD

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Krian, maka tantangan dan peluang Kecamatan Krian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Peluang dan Tantangan

PELUANG	Perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik
	adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam
	Ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa
	adanya pengembangan kawasan by pas krian
TANTANGAN	Kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan
	Masih kurang memadainya prasarana dan sarana pelayanan
	Kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa
	Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada Masyarakat



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Krian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Krian tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Krian

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai	Kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan
2	Profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki	Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki	Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki
3	Pendayagunaan potensi	Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan	Pendayagunaan potensi belum optimal dikarenakan hal tersebut bukan kewenangan kecamatan
4	Kapasitas aparat	Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai tupoksi	Kurangnya jumlah dan kapasitas aparat sehingga terdapat aparat yang bekerja tidak sesuai tupoksi
5	Petugas perlindungan	Kurangnya jumlah	Jumlah petugas



	masyarakat (linmas)	petugas perlindungan masyarakat (linmas)	perlindungan masyarakat tidak sebanding dengan jumlah seluruh masyarakat
6	Pembinaan pemuda	Belum adanya pembinaan pemuda untuk mengatasi permasalahan trantibum	Kurangnya pelatihan dan pembinaan pemuda untuk mengatasi permasalahan trantibum
7	Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah	Belum akuratnya data potensi seluruh desa\Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah	Kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat desa tentang desa maju
8	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kurangnya pembinaan terhadap masing-masing desa tentang indeks desa membangun



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang lembaga atau organisasi, tujuan-tujuan lembaga atau organisasi dan apa yang harus dilakukan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Selanjutnya Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 adalah; **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**

Dalam rangka pencapaian visi di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 pokok yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.2
Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti Kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk Kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya



		keadaan yang lebih baik dari sebelumnya” sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo disegala Bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau Pembangunan Berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas dan lugas namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat bear bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kedepan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang



		perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
--	--	--

Berdasarkan tabel di atas Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pokok-pokok Visi diatas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan. Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta



secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan. Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbang kertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan sertaKebutuhan Dasar Lainnya. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh duniabahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya



manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 V-9 berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Selanjutnya, berikut adalah tabel hasil analisis terhadap telaah Visi-Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo.



Tabel 3.3
Analisis Hasil Telaah Visi-Misi Dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Sidoarjo

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.	Kurang tenaga kerja tanpa didukung skil yang memadai Kurang pelatihan dan diklat terkait perencanaan dan pelaporan anggaran dan kinerja	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A
		Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;		Peraturan perundangan pedoman dalam perencanaan dan pelaporan
		Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur		Analisis Jabatan dan beban Kerja
		Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja		Peningkatan anggaran pemenuhan sarana dan prasaran penunjang kinerja aparatur
		Etos kerja yang belum terbina secara optimal		
		Kurangnya jumlah SDM PD		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Povinsi Jawa Timur tidak dipakai dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perrangkat Daerah Kecamatan Krian ini. Karena Renstra PD Kecamatan Krian hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- (a) kebijakan penetapan struktur ruang wilayah,
- (b) kebijakan penetapan pola ruang wilayah,
- (c) kebijakan penetapan kawasan strategis, dan
- (d) kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir.

Selain itu, kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten sidoarjo meliputi :

- (a) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangaunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi untuk mencapai kebijakan pemantapan kawasan lindung antara lain dengan
 - (1) pengelolaan secara terpadu dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara ketat;
 - (2) melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung yang mengalami



kerusakan;

- (3) penegakan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten;
 - (4) melestarikan dan merevitalisasi cagar budaya tanpa mengurangi estetika dan historisnya;
 - (5) didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali tidak mengganggu fungsi lindung;
 - (6) didalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada; dan
 - (7) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya
- (b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi:
- (1) Penataan kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta
 - (2) Penatagunaan tanah, air, udara, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan ditujukan untuk menjamin terjaganya kualitas serta mewujudkan tertib penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas tanah, air, udara dan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi kelestariannya dan demi kepentingan semua lapisan masyarakat.
- Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :
- (a) Rencana penggunaan ruang untuk utilitas (air bersih),
 - (b) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) IV,



- (c) Rencana pengembangan jalan kolektor primer,
- (d) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan nongedung,
- (e) Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan
- (f) Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kecamatan Krian merupakan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) IV, yang meliputi wilayah Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu; dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian. Sebagai daerah dengan fungsi pertanian teknis, kecamatan krian, lahan-lahan pertanian digunakan untuk tanaman padi, tebu, palawija, serta peternakan besar (sapi, Sapi Perah, kerbau, Kuda) dan peternakan kecil (kambing, domba, kelinci).

Kecamatan Krian masuk dalam pusat permukiman perkotaan, yaitu orde K-2 dengan hirarki perkotaan sedang dengan jumlah penduduk mencapai 123.341 jiwa. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :

- (a) Program pembangunan terminal,
- (b) Pengembangan jalan kolektor primer,
- (c) Pengembangan kawasan bypass sebagai pusat industri dan perdagangan dengan indikasi program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan pembangunan. Sebagai pusat industri kecamatan krian diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah melalui pengembangan kawasan bypass, dimana 207 orang dari 28.304 orang bekerja pada sektor usaha industri/kerajinan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, sertamenga komodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai



mitra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Berkaitan dengan rencana penggunaan ruang untuk utilitas (air bersih), terdapat indikasi optimalisasi penggunaan struktur ruang. Sebagai kawasan dengan potensi keberadaan air bersih yang cukup melimpah, selain penggunaan saluran PDAM dimana instalasinya berada di wilayah Kecamatan Krian, dimaksimalkan pula penggunaan sumur dangkal dan sumur bor. Dalam hal ini yang harus menjadi perhatian adalah lingkungan hidup, dimana kecamatan krian merupakan wilayah pusat perkotaan Orde K-2 dan merupakan pusat pertumbuhan pertanian, industri, dan pemukiman. Harus ada keseimbangan rencana penggunaan struktur ruang agar tidak terjadi ketimpangan pemanfaatan struktur ruang, dimana keberadaan utilitas (air bersih) akan dipengaruhi oleh rencana struktur ruang lain. Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah pendanaan perencanaan struktur ruang, agar perencanaan dapat diimplementasikan dengan maksimal. RTRW harus menjadi acuan dalam menetapkan perencanaan pembangunan, sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap, lebih penting adalah pemahaman pegawai kecamatan krian terhadap RTRW dan perkembangan wilayah harus ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan pengalihan lahan pertanian menjadi non-pertanian, dimana pengalihan ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, seperti industri dan jasa. Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan kecamatan krian sebagai pusat pertanian teknis, sehingga pengalihan lahan harus semaksimal mungkin dikurangi. Produktifitas lahan pertanian kecamatan krian menunjukkan tren positif yang harus dipertahankan. Selain sebagai pusat pertanian teknis, kecamatan krian harus lebih meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Kecamatan Krian dituntut untuk semakin kreatif dalam merancang upaya



perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Berkaitan dengan struktur ruang sebagai pusat perindustrian, kawasan bypass krian diproyeksikan sebagai pusat perindustrian dan perdagangan wilayah Kecamatan Krian, Balongbendo, Prambon, dan Wonoayu. Dalam upaya pemenuhan struktur ruang ini, terlalu fokus pada industri besar, sedangkan pada industri kecil, Implementasinya tidak lebih dari 1% masyarakat yang terjun pada sektor UMKM. Sangat diperlukan adanya keseimbangan antara industri besar dan kecil sebagai bentuk antisipatif bila terjadi krisis nasional. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), masyarakat harus didorong untuk memperkuat perekonomian lokal untuk menciptakan daya saing secara mendasar.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah kerusakan lingkungan di daerah daerah perindustrian dan pusat pemukiman. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula jika terjadi alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti kekeringan, banjir, polusi dan lain-lain. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Krian perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Krian tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.



3.5 Penentuan Isu Strategis

a. Analisis SWOT Strength (Kekuatan)

- 1) ketersediaan dana untuk menunjang program kegiatan
- 2) krian sebagai pusat industri dan perdagangan sidoarjo
- 3) kemampuan aparatur kecamatan dalam mendampingi desa
- 4) tersedianya infrastruktur jalan akses keluar-masuk wilayah Krian
- 5) struktur ruang yang jelas

Weakness (Kelemahan)

- 1) kurangnya kemampuan aparatur dalam menjalankan pelayanan public
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai
- 4) kurangnya kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola anggaran
- 5) Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat
- 6) Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk
- 7) Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha
- 8) kurangnya aparatur pendampingan desa
- 9) Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah

Opportunity (Peluang)

- 1) perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan public
- 2) adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam
- 3) ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dan desa
- 4) adanya pengembangan kawasan by pas krian

Threat (Tantangan)

- 1) kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan
- 2) Masih kurang memadainya prasarana dan sarana pelayanan



- 3) kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa
- 4) Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan.



Tabel 3.4
Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Krian

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	WEAKNESS		
		kuantitas aparatur kecamatan yang mencukupi dalam menjalankan tugas	kurangnya kemampuan aparatur dalam menjalankan pelayanan publik Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai belum terpenuhinya sarana dan prasarana secara optimal		
		ketersediaan dana untuk menunjang program kegiatan	kurangnya kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola anggaran		
		krian sebagai pusat industri dan perdagangan sidoarjo	Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha		
		kemampuan aparatur kecamatan dalam mendampingi desa	kurangnya aparatur pendampingan desa		
		tersedianya infrastruktur jalan akses keluar-masuk wilayah Krian			
		struktur ruang yang jelas	Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah		
		PELUANG	perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik	mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan program berbasis partisipasi masyarakat	mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lokal dengan pemberdayaan masyarakat
			adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam		
ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa					
adanya pengembangan kawasan bypass krian					
TANTANGAN	kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan	mendorong pelaksanaan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP Pelayanan yang jelas	meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan Optimalisasi dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan		
	kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa	penguatan kualitas aparatur desa dan pemerintahan desa melalui pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa	pelaksanaan pelatihan dan pendidikan aparatur secara mandiri dan berkala		
	Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat				
	Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan				



Berdasarkan tabel tersebut yang bersumber dari isu-isu Kecamatan Krian Sidoarjo, menghasilkan 6 strategi besar yang berguna dalam 5 tahun Renstra berlangsung. Strategi tersebut adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan program berbasis partisipasi masyarakat
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan local dengan pemberdayaan masyarakat
3. Mendorong pelaksanaan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP pelayanan yang jelas
4. meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan Optimalisasi dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
5. penguatan kualitas aparatur desa dan pemerintahan desa melalui pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa
6. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan aparatur secara mandiri dan berkala

b. Perumusan Strategi dan Kebijakan

Berikut merupakan rumusan strategi dari masing-masing sasaran PD disertai kebijakannya:



Tabel 3.5
Perumusan Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	perbaikan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan	pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja disesuaikan dengan beban kerja
			penyediaan peralatan dan program pendukung penyusunan dokumen dan laporan
	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Mengirimkan aparatur untuk menjalani tugas pelatihan dan Pendidikan	sistem reward bagi pegawai prestasi
			diklat aparatur secara berkala
	Meningkatnya koordinasi Pelaksanaan pengawasan kegiatan	pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan	Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
			pemberdayaan masyarakat melalui UMKM
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan		Penambahan petugas trantib	
		mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	
Meningkatkan kualitas Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	menerapkan standar pelayanan umum	membuat SOP pelayanan
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan koordinasi	Pendampingan pelaksanaan pemerintahan	Monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa



Berdasarkan tabel analisis diatas, maka dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Krian ini menghasilkan 11 Kebijakan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja disesuaikan dengan beban kerja
2. penyediaan peralatan dan program pendukung penyusunan dokumen dan laporan
3. sistem reward bagi pegawai prestasi
4. diklat aparatur secara berkala
5. pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
6. pemberdayaan masyarakat melalui UMKM
7. penambahan petugas trantib
8. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
9. membuat SOP pelayanan
10. monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa
11. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Krian

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Krian berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Krian

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja tujuan/sasaran Pada tahun						Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran Pada tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Survey Kepuasan Masyarakat	92,59	85	87	89	91	93	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	92,59	85	87	89	91	93
										Nilai SAKIP Kecamatan Krian	70,88 (BB)	78 (BB)	78,25 (BB)	78,50 (BB)	78,75 (BB)	79 (BB)
										Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan Krian	N/A	27,22	27,3	27,4	27,5	27,6
										Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Krian	N/A	4,01 (A)	4,02 (A)	4,04 (A)	4,06 (A)	4,08 (A)
								Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Trantibum yangdiselesaikan	68.42%	68.42%	73,68%	78,94%	84,21%	89,47%	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Krian yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Krian menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :



**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi ditingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
	2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan; e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; f. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai; g. Meningkatkan partisipatif masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; b. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif; c. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat
		Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemerintahan Desa Melalui Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan stakeholder 2. Peningkatan pembinaan melalui monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi ke desa. 3. Pembinaan : Administrasi desa, perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk tercapainya peningkatan persentase desa mandiri



Berdasarkan tabel diatas menghasilkan 11 Kebijakan yang dimiliki oleh Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Kebijakan tersebut adalah:

- a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja disesuaikan dengan beban kerja
- b. Penyediaan peralatan dan program pendukung penyusunan dokumen dan laporan
- c. Sistem reward bagi pegawai prestasi
- d. Diklat aparatur secara berkala
- e. Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
- f. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM
- g. Penambahan petugas trantib
- h. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- i. Membuat SOP pelayanan
- j. Monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa
- k. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Kecamatan Krian					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	n/a	a. 98% b. 98% c. 98%	516.680.587 	a. 98% b. 98% c. 98%	215.798.840 	a. 98% b. 98% c. 98%	1.866.191.883,45 	a. 98% b. 98% c. 98%	1.980.471.463,16 	a. 98% b. 98% c. 98%	2.079.495.036,32 	a. 98% b. 98% c. 98%	2.183.469.788,14 	Kecamatan Krian			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti (....berkas)	n/a	24.500 Berkas	78.850.000	24.500 Berkas		24.500 Berkas	29.201.090,63	24.500 Berkas	30.661.145,16	24.500 Berkas	32.194.202,41	24.500 Berkas	33.803.912,53	Kecamatan Krian			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang telah diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	n/a	a. 24.500 Berkas b. 110 Orang	78.850.000													Kecamatan Krian	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				laporan		4 laporan		82.792.500		4 laporan		86.932.125		4 laporan	91.278.731	4 laporan	95.842.668



	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	n/a		138.135.627		135.476.340		185.986.017		195.285.318		205.049.584		215.302.063	Kecamatan Krian
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat hasil koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	n/a	a. 5 kegiatan b. 5 kegiatan c. 8 kegiatan d. 6 kegiatan	138.135.627											Kecamatan Krian
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19 Laporan	135.476.340	19 Laporan	142.250.157	19 Laporan	149.362.665	19 Laporan	156.830.798	19 Laporan	164.672.338	Kecamatan Krian
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan (...berkas) 2. Jumlah laporan hasil money bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (...laporan)	n/a	1. 26 Berkas 2. 5 Laporan 3. 4 laporan	299.694.960	1. 26 Berkas 2. 5 Laporan 3. 4 laporan	80.322.500	1. 26 Berkas 2. 5 Laporan 3. 4 laporan	1.651.004.775,00	1. 26 Berkas 2. 5 Laporan 3. 4 laporan	1.754.524.999,29	1. 26 Berkas 2. 5 Laporan 3. 4 laporan	1.842.251.249,25	1. 26 Berkas 2. 5 Laporan 3. 4 laporan	1.934.363.811,72	Kecamatan Krian



KELURAHAN TAMBAKKEMERAKAN																
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	n/a	98%	177.454.710	98%	231.300.000	98%	173.284.470	98%	181.948.693	98%	191.046.128	98%	200.598.434	Kelurahan tambakkemerakan	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat (3 kelurahan)	n/a	3 Kelurahan	177.454.710	3 Kelurahan	231.300.000	3 Kelurahan	173.284.470	3 Kelurahan	181.948.693	3 Kelurahan	191.046.128	3 Kelurahan	200.598.434	Kelurahan tambakkemerakan	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Warga yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (orang)	n/a	80 Orang	6.250.000											Kelurahan tambakkemerakan	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga	12.500.000	7 Lembaga	13.125.000	7 Lembaga	13.781.250	7 Lembaga	14.470.313	7 Lembaga	15.193.828	Kelurahan tambakkemerakan	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	a. Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang dibina b. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan c. Jumlah RT yang memperoleh bantuan operasional d. Jumlah RT/RW yang memperoleh bantuan honorarium	n/a	a. 7 Lembaga b. 0 orang c. 17 RT d. 17 orang	171.204.710											Kelurahan tambakkemerakan	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	218.800.000	1 Pokmas/Ormas	229.740.000	1 Pokmas/Ormas	241.227.000	1 Pokmas/Ormas	253.288.350	1 Pokmas/Ormas	265.952.768	Kelurahan tambakkemerakan	
KELURAHAN KEMASAN																
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	n/a	98%	275.474.948	98%	355.950.000	98%	416.355.744	98%	437.173.531	98%	459.032.208	98%	481.983.818	Kelurahan Kemas	



			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat (3 kelurahan)	n/a	3 Kelurahan	275.474.948	3 Kelurahan	355.950.000	3 Kelurahan	416.355.744	3 Kelurahan	437.173.531	3 Kelurahan	459.032.208	3 Kelurahan	481.983.818	Kelurahan Kemasan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	a. Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang dibina b. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan c. Jumlah RT yang memperoleh bantuan operasional d. Jumlah RT/RW yang memperoleh bantuan honorarium	n/a	a. 0 lembaga b. 4 Kali c. 35 RT d. 35 orang	275.474.948											Kelurahan Kemasan	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 Pokmas/Ormas	355.950.000	3 Pokmas/Ormas	373.747.500	3 Pokmas/Ormas	392.434.875	3 Pokmas/Ormas	412.056.619	3 Pokmas/Ormas	432.659.450	Kelurahan Kemasan		
KELURAHAN KRIAN																			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	n/a	98%	404.394.000	98%	404.850.000	98%	234.419.063	98%	246.140.016	98%	258.447.016	98%	271.369.367	Kelurahan Krian	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat (3 kelurahan)	n/a	3 Kelurahan	404.394.000	3 Kelurahan	404.850.000	3 Kelurahan	234.419.063	3 Kelurahan	246.140.016	3 Kelurahan	258.447.016	3 Kelurahan	271.369.367	Kelurahan Krian	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Warga yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (orang)	n/a	1100 Orang	25.222.500											Kelurahan Krian	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Lembaga		Lembaga	26.483.625	Lembaga	27.807.806	Lembaga	29.198.197	Lembaga	30.658.106	Kelurahan Krian	



			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	a. Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang dibina b. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan c. Jumlah RT yang memperoleh bantuan operasional d. Jumlah RT/RW yang memperoleh bantuan honorarium	n/a	a. 6 Lembaga b. 0 orang c. 49 RT d. 49 orang	379.171.500	a.		a.		a.		a.		a.		Kelurahan Krian		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6 Pokmas/Ormas	404.850.000	6 Pokmas/Ormas	425.092.500	6 Pokmas/Ormas	446.347.125	6 Pokmas/Ormas	468.664.481	6 Pokmas/Ormas	492.097.705		Kelurahan Krian		
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	n/a	98%	196.557.990	98%	166.959.070	98%	182.230.101	98%	191.341.606	98%	200.908.687	98%		Kecamatan Krian		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun (...laporan)	n/a	20 Laporan	174.825.950	20 Laporan	86.850.000	20 Laporan	125.093.980,84	20 Laporan	131.348.679,88	20 Laporan	137.916.113,88	20 Laporan	144.811.919,57		Kecamatan Krian	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (...kegiatan) b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan (...kegiatan)	n/a	a. 20 kegiatan b. 2 kegiatan	141.050.000												Kecamatan Krian	



		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Laporan		90 Laporan	148.102.500	90 Laporan	155.507.625	90 Laporan	163.283.006	90 Laporan	171.447.157	Kecamatan Krian	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	n/a	3 kegiatan	33.775.950											Kecamatan Krian	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 laporan	86.850.000	8 laporan	91.192.500	8 laporan	95.752.125	8 laporan	100.539.731	8 laporan	105.566.718	Kecamatan Krian	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi (... permasalahan)	n/a	30 permasalahan	21.732.040	30 permasalahan	54.415.352,72	30 permasalahan	57.136.120,36	30 permasalahan	59.992.926,38	30 permasalahan	62.992.572,70	30 permasalahan	66.142.201,33	Kecamatan Krian	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (...kegiatan)	n/a	a. 72 kegiatan	21.732.040											Kecamatan Krian	



	Kepolisian Negara Republik Indonesia	b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar (.....permasalahan) c. Jumlah monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (.....kegiatan)		b. 10 permasalahan c. 1 kegiatan														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			24 Laporan	80.109.070	24 Laporan	84.114.524	24 Laporan	88.320.250	24 Laporan	92.736.262	24 Laporan	97.373.075				Kecamatan Krian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	n/a	98%	6.083.333	98%	82.475.000	98%	272.367.729	98%	285.986.116	98%	300.285.421	98%	315.299.692			Kecamatan Krian
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (.....kegiatan)	n/a	3 kegiatan	6.083.333	3 kegiatan	82.475.000	3 kegiatan	272.367.729	3 kegiatan	285.986.116	3 kegiatan	300.285.421	3 kegiatan	315.299.692			Kecamatan Krian



		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	n/a	a. 2 Kegiatan b. 1 kegiatan	6.083.333											Kecamatan Krian
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				88 Orang	82.475.000	88 Orang	86.598.750	88 Orang	90.928.688	88 Orang	95.475.122	88 Orang	100.248.878	Kecamatan Krian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	n/a	98%	45.364.000	98%	84.275.000	98%	139.640.641	98%	146.622.673	98%	153.953.807	98%	161.651.497	Kecamatan Krian



	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (19 desa)	n/a	19 Desa	45.364.000	19 Desa	84.275.000	19 Desa	139.640.641	19 Desa	146.622.673	19 Desa	153.953.807	19 Desa	161.651.497	Kecamatan Krian	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	n/a	a. 19 Desa b. 19 Desa	21.314.000											Kecamatan Krian	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	84.275.000	2 Dokumen	88.488.750	2 Dokumen	92.913.188	2 Dokumen	97.558.847	2 Dokumen	102.436.789	Kecamatan Krian	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	n/a	2 kegiatan	24.050.000											Kecamatan Krian	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen		1 Dokumen	25.252.500	1 Dokumen	26.515.125	1 Dokumen	27.840.881	1 Dokumen	29.232.925	Kecamatan Krian	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	n/a	98%	7.770.367.868	98%	7.023.957.265	98%	12.405.208.750	98%	13.031.874.187	98%	13.689.372.897	98%	14.379.246.542	Kecamatan Krian	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi	n/a	a. 4 tahapan b. 3 rekomendasi		a. 4 tahapan b. 3 rekomendasi	1.670.900	a. 4 tahapan b. 3 rekomendasi	134.643.275	a. 4 tahapan b. 3 rekomendasi	147.780.439	a. 4 tahapan b. 3 rekomendasi	161.074.461	a. 4 tahapan b. 3 rekomendasi	174.533.184	Kecamatan Krian	



		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	n/a	4 Laporan	50.000.000											Kecamatan Krian
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen		4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	40.000.000	Kecamatan Krian
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	n/a	1 Buah	950.000											Kecamatan Krian
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		1 Dokumen	950.000	Dokumen	950.000	1 Dokumen	950.000	1 Dokumen	950.000	Kecamatan Krian
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	n/a	1 Buah	950.000											Kecamatan Krian
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		1 Dokumen	950.000	Dokumen	950.000	1 Dokumen	950.000	1 Dokumen	950.000	Kecamatan Krian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	n/a	1 Laporan	56.910.000											Kecamatan Krian
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.670.900	4 Laporan	62.743.275	4 Laporan	65.880.439	4 Laporan	69.174.461	4 Laporan	72.633.184	Kecamatan Krian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	n/a	98%	4.903.462.745	98%	5.150.995.690	98%	6.332.562.939	98%	6.649.191.086	98%	6.981.650.641	98%	7.330.733.173	Kecamatan Krian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	n/a	12 Bulan	4.899.272.151											Kecamatan Krian
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang	5.148.571.090	34 Orang	5.405.999.645	34 Orang	5.676.299.627	34 Orang	5.960.114.608	34 Orang	6.258.120.338	Kecamatan Krian



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	n/a	4 Laporan	4.190.594											Kecamatan Krian
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	2.424.600	15 Laporan	2.545.830	15 Laporan	2.673.122	15 Laporan	2.806.778	15 Laporan	2.947.116	Kecamatan Krian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	n/a	a. 98% b. 98%		a. 98% b. 98%		a. 98% b. 98%	44.761.500	a. 98% b. 98%	46.999.575	a. 98% b. 98%	49.349.554	a. 98% b. 98%	51.817.031	Kecamatan Krian
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	n/a	Laporan												Kecamatan Krian
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		Kecamatan Krian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			647.167.963		516.848.775		1.476.324.861,49		1.550.141.104,56		1.627.648.159,79		1.709.030.567,78	Kecamatan Krian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia	n/a	11 Jenis	9.409.840											Kecamatan Krian
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	9.442.935	11 Paket	9.915.082	11 Paket	10.410.836	11 Paket	10.931.378	11 Paket	11.477.947	Kecamatan Krian



		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	n/a	40 Jenis	63.081.898											Kecamatan Krian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	32.481.170	3 Paket	34.105.229	3 Paket	35.810.490	3 Paket	37.601.014	3 Paket	39.481.065	Kecamatan Krian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan b. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	n/a	17667 Liter	161.000.000											Kecamatan Krian
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	164.422.000	1 Paket	172.643.100	1 Paket	181.275.255	1 Paket	190.339.018	1 Paket	199.855.969	Kecamatan Krian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	n/a	10 Jenis	44.635.500											Kecamatan Krian
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	12.681.250	5 Paket	13.315.313	5 Paket	13.981.078	5 Paket	14.680.132	5 Paket	15.414.139	Kecamatan Krian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	n/a	2 Jenis	2.400.000											Kecamatan Krian
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.400.000	2 Dokumen	2.520.000	2 Dokumen	2.646.000	2 Dokumen	2.778.300	2 Dokumen	2.917.215	Kecamatan Krian
		Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang tersedia	n/a	27 Jenis	41.556.136											Kecamatan Krian
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	18.512.930	4 Paket	19.438.577	4 Paket	20.410.505	4 Paket	21.431.031	4 Paket	22.502.582	Kecamatan Krian
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	n/a	a. 6600 Kotak b. 0 orang	167.610.000											Kecamatan Krian



			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			4 laporan	121.100.000	4 laporan	127.155.000	4 laporan	133.512.750	4 laporan	140.188.388	4 laporan	147.197.807	Kecamatan Krian	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	n/a	a. 98% b. 98%	157.474.589											Kecamatan Krian	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	155.808.490	1 Laporan	163.598.915	1 Laporan	171.778.860	1 Laporan	180.367.803	1 Laporan	189.386.193	Kecamatan Krian	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	n/a		432.360.807		619.543.485		650.520.659		683.046.692		717.199.026		753.058.976	Kecamatan Krian	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	1 Gedung	432.360.807											Kecamatan Krian	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit		Unit	453.978.847	Unit	476.677.790	Unit	500.511.679	Unit	525.537.263	Kecamatan Krian	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		1 Gedung												Kecamatan Krian	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kecamatan Krian	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	6 Unit	16.429.090											Kecamatan Krian	



			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		1 Unit	17.250.545	1 Unit	18.113.072	1 Unit	19.018.725	1 Unit	19.969.662	Kecamatan Krian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	n/a	98%	1.198.159.600	98%	1.273.112.800	98%	1.602.050.202,90	98%	1.682.152.713,05	98%	1.766.260.348,70	98%	1.854.573.366,13	Kecamatan Krian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	n/a	2500 Surat	3.000.000											Kecamatan Krian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.150.000	12 Laporan	3.307.500	12 Laporan	3.472.875	12 Laporan	3.646.519	Kecamatan Krian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	n/a	12 bulan	169.800.000											Kecamatan Krian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	147.600.000	12 laporan	154.980.000	12 laporan	162.729.000	12 laporan	170.865.450	12 laporan	179.408.723	Kecamatan Krian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; d.. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	n/a	a. 5 Orang b. 3 Orang c. 4 Orang d. 24 Orang	1.025.359.600											Kecamatan Krian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	1.122.512.800	12 laporan	1.178.638.440	12 laporan	1.237.570.362	12 laporan	1.299.448.880	12 laporan	1.364.421.324	Kecamatan Krian	



		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	n/a		589.216.753		83.000.000		2.164.345.313		2.272.562.578		2.386.190.707		2.505.500.242		Kecamatan Krian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; b. Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	n/a	a. 4 Unit b. 2 Unit c. 4 Unit	84.000.000												Kecamatan Krian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	47.000.000	12 Unit	49.350.000	12 Unit	51.817.500	12 Unit	54.408.375	12 Unit	57.128.794		Kecamatan Krian
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dipelihara	n/a	3 Unit	50.000.000												Kecamatan Krian
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				Unit		Unit	52.500.000	Unit	55.125.000	Unit	57.881.250	Unit	60.775.313		Kecamatan Krian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	n/a	2 Jenis	67.000.000												Kecamatan Krian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				40 Unit	36.000.000	Unit	37.800.000	Unit	39.690.000	Unit	41.674.500	Unit	43.758.225		Kecamatan Krian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/ruamah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	1 Gedung	296.000.000												Kecamatan Krian
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		2 Unit	310.800.000,00	2 Unit	326.340.000,00	2 Unit	342.657.000,00	2 Unit	359.789.850,00		Kecamatan Krian



		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	20 Unit	50.000.000												Kecamatan Krian
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	5 Unit	52.500.000	5 Unit	55.125.000	5 Unit	57.881.250	5 Unit	60.775.313			Kecamatan Krian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	100 m2	42.216.753												Kecamatan Krian
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				Ha	Ha	44.327.591	Ha	46.543.970	Ha	48.871.169	Ha	51.314.727			Kecamatan Krian
KELURAHAN TAMBAKKEMERAKAN																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan	n/a		593.374.511		623.043.237		654.195.399		686.905.169		721.250.427		757.312.948		Kelurahan tambakkemerakan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			96.023.471		100.824.645		105.865.877		111.159.171		116.717.129		122.552.986		Kelurahan tambakkemerakan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	n/a	10 Jenis	5.951.110												Kelurahan tambakkemerakan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9.670.073	9 Paket	10.153.577	9 Paket	10.661.255	9 Paket	11.194.318	9 Paket	11.754.034		Kelurahan tambakkemerakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	n/a	25 Jenis	14.120.810												Kelurahan tambakkemerakan



		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	34.419.000	33 Paket	36.139.950	33 Paket	37.946.948	33 Paket	39.844.295	33 Paket	41.836.510	Kelurahan tambakkemerakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan b. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	n/a	a. 1333 liter b. 0 liter	24.000.000											Kelurahan tambakkemerakan	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.000.000	3 Paket	25.200.000	3 Paket	26.460.000	3 Paket	27.783.000	3 Paket	29.172.150	Kelurahan tambakkemerakan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	n/a	2 Jenis	7.848.860											Kelurahan tambakkemerakan	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.900.000	2 Paket	10.395.000	2 Paket	10.914.750	2 Paket	11.460.488	2 Paket	12.033.512	Kelurahan tambakkemerakan	
	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang tersedia	n/a	15 Jenis	5.250.960											Kelurahan tambakkemerakan	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	16.324.550	20 Paket	17.140.778	20 Paket	17.997.816	20 Paket	18.897.707	20 Paket	19.842.593	Kelurahan tambakkemerakan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	n/a	a. 400 kotak b. 200 orang	34.070.000											Kelurahan tambakkemerakan	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 laporan	28.500.000	2 laporan	29.925.000	2 laporan	31.421.250	2 laporan	32.992.313	2 laporan	34.641.928	Kelurahan tambakkemerakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	n/a	a. 90 % b. 20 kali	22.000.000											Kelurahan tambakkemerakan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	25.000.000	30 Laporan	26.250.000	30 Laporan	27.562.500	30 Laporan	28.940.625	30 Laporan	30.387.656	Kelurahan tambakkemerakan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	n/a		158.025.000		165.926.250		174.222.563		182.933.691		192.080.375		201.684.394	Kelurahan tambakkemerakan	



		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	1 Gedung	150.500.000													Kelurahan tambakkemerakan
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit		Unit	158.025.000	Unit	165.926.250	Unit	174.222.563	Unit	182.933.691			Kelurahan tambakkemerakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	1 gedung	0													Kelurahan tambakkemerakan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	163.900.000	1 Unit	172.095.000	1 Unit	180.699.750	1 Unit	189.734.738	1 Unit	199.221.474			Kelurahan tambakkemerakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	n/a	98%	293.126.040	98%	307.782.342	98%	323.171.459	98%	339.330.032	98%	356.296.534	98%	374.111.360			Kelurahan tambakkemerakan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	n/a	2100 surat	1.000.000													Kelurahan tambakkemerakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.050.000	1 laporan	1.102.500	1 laporan	1.157.625	1 laporan	1.215.506			Kelurahan tambakkemerakan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	n/a	24 Bulan	19.600.000													Kelurahan tambakkemerakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	21.600.000	24 Laporan	22.680.000	24 Laporan	23.814.000	24 Laporan	25.004.700	24 Laporan	26.254.935			Kelurahan tambakkemerakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	n/a	a. 2 orang b. 1 orang c. 2 orang d. 3 orang	248.824.800													Kelurahan tambakkemerakan



			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 laporan	268.504.800	5 laporan	281.930.040	5 laporan	296.026.542	5 laporan	310.827.869	5 laporan	326.369.263	Kelurahan tambakkemerakan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	n/a		46.200.000		48.510.000		50.935.500		53.482.275		56.156.389		58.964.208	Kelurahan tambakkemerakan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; b. Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	n/a	a. 3 jenis b. 2 jenis C. 3 unit	26.650.000											Kelurahan tambakkemerakan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	35.000.000	3 Unit	36.750.000	3 Unit	38.587.500	3 Unit	40.516.875	3 Unit	42.542.719	Kelurahan tambakkemerakan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	n/a	2 Jenis	27.600.000											Kelurahan tambakkemerakan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				Unit	30.000.000	Unit	31.500.000	Unit	33.075.000	Unit	34.728.750	Unit	36.465.188	Kelurahan tambakkemerakan	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang dipelihara/ rehabilitasi	n/a	2 Gedung	200.000.000											Kelurahan tambakkemerakan	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit		Unit	210.000.000	Unit	220.500.000	Unit	231.525.000	Unit	243.101.250	Kelurahan tambakkemerakan	



			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	n/a		14.775.453		15.514.226		16.289.937		17.104.434		17.959.655		18.857.638	Kelurahan Kemasan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	n/a	1 Jenis	22.936.310											Kelurahan Kemasan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit		Unit	24.083.126	Unit	25.287.282	Unit	26.551.646	Unit	27.879.228	Kelurahan Kemasan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	2 Unit	0											Kelurahan Kemasan
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	362.500.000	2 Unit	380.625.000	2 Unit	399.656.250	2 Unit	419.639.063	2 Unit	440.621.016	Kelurahan Kemasan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	n/a	98%	305.966.640		321.264.972		337.328.221		354.194.632		371.904.363		390.499.581	Kelurahan Kemasan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	n/a	960 Lembar	800.000											Kelurahan Kemasan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	1.000.000	12 laporan	1.050.000	12 laporan	1.102.500	12 laporan	1.157.625	12 laporan	1.215.506	Kelurahan Kemasan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	n/a	24 Bulan	23.000.000											Kelurahan Kemasan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.000.000	12 Laporan	51.450.000	12 Laporan	54.022.500	12 Laporan	56.723.625	12 Laporan	59.559.806	Kelurahan Kemasan



				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				Unit	29.000.000	Unit	30.450.000	Unit	31.972.500	Unit	33.571.125	Unit	35.249.681	Kelurahan Kemasan	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	Gedung	3.816.390											Kelurahan Kemasan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				Unit		Unit	4.007.210	Unit	4.207.570	Unit	4.417.948	Unit	4.638.846	Kelurahan Kemasan	
			Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	4 Unit	0											Kelurahan Kemasan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		Kelurahan Kemasan	
KELURAHAN KRIAN																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan	n/a	98%	752.160.400		789.768.420		829.256.841		870.719.683		914.255.667		959.968.450	Kelurahan Krian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			94.440.352		99.162.369		104.120.488		109.326.512		114.792.838		120.532.480	Kelurahan Krian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia	n/a	7 Jenis	4.101.460											Kelurahan Krian	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7.678.660	8 Paket	8.062.593	8 Paket	8.465.723	8 Paket	8.889.009	8 Paket	9.333.459	Kelurahan Krian	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	n/a	24 Jenis	20.260.584											Kelurahan Krian	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	22.393.800	27 Paket	23.513.490	27 Paket	24.689.165	27 Paket	25.923.623	27 Paket	27.219.804	Kelurahan Krian	



			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	4 Paket	0												Kelurahan Krian
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000	1 Unit	210.000.000	1 Unit	220.500.000	1 Unit	231.525.000	1 Unit	243.101.250		Kelurahan Krian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	n/a	98%	227.685.360		239.069.628		251.023.109		263.574.265		276.752.978		290.590.627		Kelurahan Krian
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	n/a	25 Surat	800.000												Kelurahan Krian
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan	0	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	n/a	24 Bulan	24.600.000												Kelurahan Krian
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	29.000.000	24 Laporan	30.450.000	24 Laporan	31.972.500	24 Laporan	33.571.125	24 Laporan	35.249.681		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	n/a	a. 2 orang b. 1 orang c. 2 Orang d. 1 orang	174.243.200												Kelurahan Krian
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	193.803.200	12 Laporan	203.493.360	12 Laporan	213.668.028	12 Laporan	224.351.429	12 Laporan	235.569.001		Kelurahan Krian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	n/a		92.400.000		97.020.000		101.871.000		106.964.550		112.312.778		117.928.416		Kelurahan Krian



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; b. Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	n/a	a. 3 Unit b. 0 unit c. 2 Unit	26.650.000												Kelurahan Krian
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	19.000.000	4 Unit	19.950.000	4 Unit	20.947.500	4 Unit	21.994.875	4 Unit	23.094.619		Kelurahan Krian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		2 Jenis	32.000.000												Kelurahan Krian
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				Unit	30.000.000	Unit	31.500.000	Unit	33.075.000	Unit	34.728.750	Unit	36.465.188		Kelurahan Krian
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/kantor/ruang dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	1 Unit	0												Kelurahan Krian
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Gedung		0 Gedung		0 Gedung		0 Gedung		0 Gedung			Kelurahan Krian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	n/a	20 Unit	0												Kelurahan Krian



				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kelurahan Krian	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	-----------------	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Indikator Kinerja pembangunan daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja menggambarkan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dengan kata lain indikator kinerja adalah alat ukur spesifik dalam hal efektifitas program dan/atau kegiatan yang dirancang dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan.

Untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Krian berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Krian Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum											
Nilai SKM Kecamatan Krian	92,59	79	85	87	89	91	93	93	Nilai	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjo.kab.go.id/ Dengan range penilaian sebagai berikut : a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang Baik c. 76,81 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat Baik
Nilai SAKIP Kecamatan Krian	70,88	70,88 (BB)	78 (BB)	78,25 (BB)	78,50 (BB)	78,75 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	Nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 99 – 100 2. A untuk hasil nilai 80 – 90 3. BB untuk hasil nilai 70 -80 4. B untuk hasil nilai 60 – 70 5. CC untuk hasil nilai 50 – 60 6. C untuk hasil nilai 30 – 50 7. D untuk hasil nilai 0 - 30
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan Krian	N/A	N/A	27,22	27,3	27,4	27,5	27,6	27,6	Nilai	Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar	Penilaian didapat dari mengisi LKE dari Inspektorat



										terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.	
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Krian	N/A	N/A	4,01 (A)	4,02 (A)	4,04 (A)	4,06 (A)	4,08 (A)	4,08 (A)	Nilai	IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Indeks penilaian IPP sebagai berikut : a. 0 -1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan prima
Prosentase Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	N/A	68.42%	68.42%	73,68%	78,94%	84,21%	89,47%	89,47%	Persen	Data pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi dibagi dengan seluruh data pelanggaran Perda dan Perkada yang masuk	Jumlah permasalahan trantibum yang difasilitasi dalam satu tahun / jumlah permasalahan trantibum dalam satu tahun x 100%



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Krian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	N/A	26,486,250	27,810,562.50	29,201,090.63	30,661,145.16	32,194,202.41	100%
KELURAHAN TAMBAK KEMERAKAN								
	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di kelurahan Tambak Kemerakan	N/A	157,174,122	165,032,828	173,284,470	181,948,693	191,046,128	100%
KELURAHAN KEMASAN								
	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di kelurahan	N/A	377,646,933	396,529,280	416,355,744	437,173,531	459,032,208	100%
KELURAHAN KRIAN								
	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di kelurahan	N/A	212,625,000	223,256,250	234,419,063	246,140,016	258,447,016	100%
	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang di tindaklanjuti	N/A	168,694,801	177,129,540.79	185,986,017.83	195,285,318.72	205,049,584.65	100%
	Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat	N/A	1,515,624,662	1,572,385,500.00	1,651,004,775.00	1,754,524,999.29	1,842,251,249.25	100%
	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketertarikan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina	N/A	113,463,928	119,137,124.61	125,093,980.84	131,348,679.88	137,916,113.88	100%
	persentase temuan pelanggaran perda, perkara dan konflik yang ditangani	N/A	51,824,145	54,415,352.72	57,136,120.36	59,992,926.38	62,992,572.70	100%
	Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional	N/A	247,045,559	259,397,837	272,367,729	285,986,116	300,285,421	100%
	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	N/A	126,658,178	132,991,087	139,640,641	146,622,673	153,953,807	100%
	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil	N/A	108,810,000	121,655,500	134,643,275	147,780,439	161,074,461	100%



	evaluasi							
	Persentase realisasi anggaran PD	N/A	5,743,821,260	6,031,012,323	6,332,562,939	6,649,191,086	6,981,650,641	100%
	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	N/A	40,600,000	42,630,000	44,761,500	46,999,575	49,349,554	100%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	1,339,070,169	1,406,023,677.61	1,476,324,861.49	1,550,141,104.56	1,627,648,159.79	100%
	Jenis BMD yang diadakan	N/A	590,041,414	619,543,485	650,520,659	683,046,692	717,199,026	100%
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	N/A	1,453,106,760	1,525,762,098.00	1,602,050,202.90	1,682,152,713.05	1,766,260,348.70	100%
	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	N/A	1,963,125,000	2,061,281,250	2,164,345,313	2,272,562,578	2,386,190,707	100%
KELURAHAN TAMBAK KEMERAKAN								
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	96,023,471	100,824,645	105,865,877	111,159,171	116,717,129	100%
	Jenis BMD yang diadakan	N/A	158,025,000	165,926,250	174,222,563	182,933,691	192,080,375	100%
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	N/A	293,126,040	307,782,342	323,171,459	339,330,032	356,296,534	100%
	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	N/A	46,200,000	48,510,000	50,935,500	53,482,275	56,156,389	100%
KELURAHAN KEMASAN								
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	120,270,136	126,283,643	132,597,825	139,227,717	146,189,102	100%
	Jenis BMD yang diadakan	N/A	14,775,453	15,514,226	16,289,937	17,104,434	17,959,655	100%
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	N/A	305,966,640	321,264,972	337,328,221	354,194,632	371,904,363	100%
	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	N/A	56,700,000	59,535,000	62,511,750	65,637,338	68,919,204	100%
KELURAHAN KRIAN								
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	94,440,352	99,162,369	104,120,488	109,326,512	114,792,838	100%
	Jenis BMD yang diadakan	N/A	109,949,328	115,446,795	121,219,134	127,280,091	133,644,096	100%
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	N/A	227,685,360	239,069,628	251,023,109	263,574,265	276,752,978	100%
	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	N/A	92,400,000	97,020,000	101,871,000	106,964,550	112,312,778	100%



BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Krian Tahun 2021- 2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Krian sampai dengan Tahun 2026 Renstra Kecamatan Krian Tahun 2021-2026 ini disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya memenuhi amanat perundang-undangan, bahwa Renstra Kecamatan Krian tahun 2021-2026 ini memuat kebijakan pembangunan Kecamatan Krian mulai dari tahap Perencanaan, tujuan, sasaran dan lainnya. Dokumen ini juga disusun untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Krian dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Krian ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Krian ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Krian harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krian Tahun 2021-2026 ini disusun, terimakasih atas segala bentuk kerjasama, dukungan dan etos kerja dari berbagai pihak demi mewujudkan capaian visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah kabupaten sidoarjo secara umum,



serta secara khusus mewujudkan capaian visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah Kecamatan Krian.

Krian, Maret 2023
Camat Krian

AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP.
Pembina Tk. I
NIP. 198003221998101001